

PERUBAHAN POLA-POLA PRODUKSI dan KONSUMSI yang BERKELANJUTAN: DIMENSI SOSIAL POLITIK

M. Fadhil Nurdin

I. PENDAHULUAN

Perubahan pola-pola produksi dan konsumsi dalam kehidupan masyarakat merupakan fenomena yang dapat dipandang dari dua sisi, selaras atau tidak dengan hakikat pembangunan berkelanjutan. Perubahan pola-pola produksi dan konsumsi dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dipandang sebagai '*economic activities*', tetapi juga non-ekonomi. Dalam pandangan sosial politik, perubahan pola-pola produksi dan konsumsi melingkupi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam-nya sistem kelembagaan dan penggunaan kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan untuk kesejahteraan rakyat merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diselaraskan dengan konsepsi pembangunan sosial dan politik. Lingkup pembangunan kesejahteraan rakyat ada dalam kombinasi pertumbuhan dan perubahan dalam proses *ekonomi, sosial* dan *politik*. Dalam praktek pembangunan, pembangunan ekonomi yang telah lama mendominasi model-model pembangunan, ternyata perlu diimbangi dengan paradigma pembangunan sosial politik yang saling *terintegrasi* dan *komplementer*. Dengan kata lain, pembangunan yang ditujukan untuk menyejahterakan rakyat, perlu memandang bahwa perubahan perilaku, sistem nilai, norma-norma, peraturan dan perundang-undangan harus didasar-kan serta terkait dengan perubahan pola-pola produksi dan konsumsi. Artinya, dalam perubahan pola-pola produksi dan konsumsi yang terjadi dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat, perlu ada upaya serta penataan yang searah dengan pemahaman pembangunan yang berkeadilan sosial.

II. FAKTA DAN ISU GLOBAL

Sekilas, jika melihat fakta tentang krisis multi dimensi yang berlanjut sampai sekarang, permasalahan atau isu-isu global menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan dalam menanggulangi berbagai masalah kemasaan, pengangguran, dan kemiskinan belum berhasil. Fakta dalam kehidupan masyarakat menunjukkan, setiap peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam masyarakat, seharusnya diwujudkan dalam sosialisasi pada budaya yang diatur oleh norma-norma dan aturan-aturan tertentu. Bersamaan dengan itu, peluang-peluang yang diberikan oleh institusi pemerintah bagi seluruh anggota masyarakat luas untuk dapat memberikan kontribusi secara aktif dan berpengaruh dalam proses pembangunan, serta mendapat manfaat secara adil dari hasil pembangunan belum dapat menunjukkan hasil yang diharapkan. Pada waktu yang sama pula, hubungan antar kelompok pada tingkat internasional dan global kurang kondusif bagi membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang lebih baik hari ini.

II.1 Kesejahteraan Rakyat

Hakekat pembangunan adalah untuk menyejahterakan rakyat. Hakekat ini menunjukkan bahwa dimensi sosial politiknya berkaitan dengan aspek-aspek kekuasaan dan manusianya, karena itu konsep pembangunan mencakup dimensi yang luas. Isu penting dalam konteks perubahan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, diperlukan: *bagaimana mahami lingkup dimensi sosial politiknya*. Isu ini menjadi penting, karena fokus dan tekanan utama dimensi sosial politik adalah bagaimana Mengembangkan "upaya-upaya" untuk menyejahterakan manusia. Secara paktis, semua upaya ini perlu "tindakan" untuk memungkinkan semua orang agar dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan sejahtera.

Dalam upaya menyejahterakan rakyat telah menjadi perhatian yang universal karenaberkaitan dengan hak-hak hidup manusia, sebagaimana telah dilaporkan UNDP menjelang *World Summit for Social Development*, pada Maret 1995 di Copenhagen. Masalah ini mencakup tujuh unsur: perlindungan,

ekonomi, makanan, kesejahteraan, polusi dan lingkungan, juga sosial politik. Semua unsur ini berkaitan dengan pembangunan manusia yang mengarah kepada *Global Human Security Fund* (Boer & Koekkoek, 1994).

Membangun kesejahteraan rakyat bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup, dengan memahami bahwa *pembangunan kesejahteraan harus menghasilkan kemajuan (progress), berkonotasi dan memandangkan jauh ke depan*. Konsep pembangunan kesejahteraan perlu dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan perubahan-perubahan sosial dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan (sosial politik) nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakeadilan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Oleh karena itu, dalam dinamika membangun masyarakat yang sejahtera diperlukan pemahaman secara holistik, agar praktiknya tidak hanya di pandang sebagai "*aktivitas dan untuk kepentingan ekonomi*". Implikasinya, program-program pembangunan termasuk dalam memahami perubahan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan perlu terus dipertanyakan; karena yang dilakukan belum tentu sesuai dengan kebutuhan nyata (*real-needs*). Kalau-pun ada program pembangunan yang dilaksanakan, praktiknya mungkin belum didasarkan kepada "*scientific spirit & social responsibility*". Upaya ini perlu terus dikaji dan ditunjukkan kepada masyarakat. Artinya, apakah model pembangunan di Indonesia telah mampu menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat ?

II.2 Kualitas SDM

Walaupun perubahan perekonomian dunia telah merubah pola-pola produksi dan konsumsi masyarakat dan bangsa (*revolusi industri*) yang salah satunya ditandai mekanisasi yang semakin canggih dengan perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong paradigma ekonomi dari *supply driven economic* menjadi *knowledge driven economic*. Selanjutnya melahirkan paradigma baru yang dikenal sebagai "*competitiveness paradigm* " antarbang-bangsa. Dalam era ini, mau tidak mau, Indonesia harus mengkaji ulang tentang masalah pengembangan SDM yang menjadi dilema besar. Bagaimapun, tekanan ada peningkatan kualitas SDM menjadi tantangan besar untuk menghadapi perubahan global yang terjadi pada masa kini.

Berpijak pada landasan pembangunan: Pancasila dan UUD 1945, maka peningkatan kualitas SDM merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menghadapi persaingan global yang tidak dapat lagi bertumpu pada keunggulan komparatif, tetapi lebih menuntut keunggulan kompetitif. Untuk itu, diperlukan SDM yang mempunyai kemampuan untuk menguasai teknologi, SDM yang mampu menciptakan kegiatan produksi dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi, mampu menciptakan inovasi dan perubahan-perubahan yang diperlukan serta mampu mengelola sumber daya dan sumber dana yang efisien dan produktif dalam proses produksi, diiringi dengan peningkatan kesejahteraan.

Mengenai jumlah SDM dan angkatan kerja di Indonesia, setidaknya terdapat tiga hal yang menarik, yaitu *pertama*, jumlah masyarakat petani di Indonesia secara absolut dan juga relatif masih sangat besar. *Kedua*, struktur tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian ini di dominasi oleh banyaknya buruh tani dan pekerja keluarga, dan *ketiga*, hanya 0,2 persen tenaga kerja pertanian yang berpendidikan tinggi. Ditinjau dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan penguasaan iptek dengan menggunakan pengukuran *Human Development Index* (HDI) tahun 1996 versi UNDP, Indonesia masih masuk pada peringkat 102 dengan nilai HDI 0,641 Philipina mencapai peringkat 95 dengan nilai HDI 0,832. Vietnam masih berada di bawah peringkat Indonesia dengan nilai 0,540 dan menduduki peringkat 121. Beberapa negara Asean lainnya, seperti Thailand dan Malaysia, menduduki peringkat 52 dan 53, dengan nilai HDI masing-masing adalah 0,832 dan 0,826. Dari perbandingan nilai-nilai tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia perlu mempersiapkan SDMnya secara lebih mantap dan mendasar bagi pembangunan mendatang.

Rendahnya kualitas SDM di pedesaan, disebabkan rata-rata tingkat pendapatan di pedesaan masih rendah. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan telah berhasil ditekan, yaitu dari sekitar 60 juta orang atau 70% dari jumlah penduduk pada tahun 1970, menjadi 25,9 juta sekitar 13,7% dari jumlah penduduk pada tahun 1993. Di lain pihak, masih terdapat 20.633 desa yang digolongkan tertinggal. Terbatasnya kesempatan kerja di pedesaan menimbulkan urbanisasi tenaga kerja, terutama tenaga kerja terampil. Dengan demikian, rata-rata kualitas tenaga kerja di pedesaan tetap rendah, menyebabkan pertumbuhan produktivitas dan efisiensi berjalan lambat.

II.3 Masalah Sosial dan Politik

Masalah global lain yang perlu juga menjadi perhatian, antara lain timbul dan berkembangnya berbagai bentuk masalah sosial dan politik, sebagai dampak dari perubahan pola-pola produksi dan konsumsi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hari ini, misalnya ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan, kenakalan remaja, dan seks bebas, dan lain sebagainya. Pada aspek politik, kebijakan dan keputusan pemerintah untuk memandang masalah konflik sosial yang mengarah pada disintegrasi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti konflik di berbagai daerah (Sambas, Poso, Ambon, Papua, Aceh, Maluku Utara). Dalam konteks internasional, berkembangnya masalah perdagangan bebas dengan penyelundupan, proteksi produk dan terorisme internasional, pertindungan HAM, dan intervensi asing terhadap kedaulatan negara.

II.4 Mengembangkan Upaya Terpadu: Sebuah Harapan?

Muncul harapan, perlunya berbagai upaya yang terpadu dalam mengembangkan peran berbagai pihak (*stake-holders*) untuk lebih mengupayakan membangun bangsa yang sejahtera. Upaya ini, tidak hanya bertumpu pada pelaku ekonomi yang dapat menjadi tumpuan pemasok devisa negara yang sangat penting artinya dalam proses pemulihan ekonomi nasional (*National Economics Recovery*). Namun hal itu menuntut pengembangan kualitas SDM, mulai dari tingkat pelaksanaan di lapangan penguasaan teknologi, dan dukungan sarana, prasarana, serta lembaga pendukung. Peran dan upaya membangun hubungan dan jaringan antarbangsa, menciptakan stabilitas sosial politik ternyata juga semakin penting, termasuk juga upaya memberdayakan berbagai kekuatan organisasi masyarakat di peringkat lokal.

III. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: PARADIGMA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUKSI - KONSUMSI

Paradigma pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya yang berpusatkan pada rakyat, tetapi juga sama pentingnya mengembangkan sistem jaringan internasional. Pembangunan yang berpusat pada rakyat sebenarnya merupakan suatu alternatif untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan dengan cara-cara yang sesuai dengan asas-asas dasar *partisipasi* dan *keadilan* dan hasilnya harus dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia. Konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama, dan memandang kesejahteraan yang berbasis pada keseimbangan antara material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Model ini lebih menekankan kepada penguatan diri (*empowerment*) yang menekankan pada kenyataan pengalaman masyarakat.

III.1. Penyadaran Masyarakat

Pendekatan pembangunan yang berpusatkan para rakyat berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menggugat subordinasi mereka melalui organisasi-organisasi lokal secara "*bottom-up*". Dalam pembangunan ini tidak mengidentifikasikan sarana untuk menjamin agar jika pembebasan nasional telah tercapai, pemberdayaan atau penguatan diri (*empowerment*) masyarakat akan secara otomatis terjadi. Oleh karena itu, penting melakukan kategorisasi kebutuhan praktis/strategis masyarakat untuk menghindari waktu sebagai determinan perubahan, karena perubahan jangka pendek belum menjamin transformasi jangka panjang, dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat tidak secara otomatis berarti terpenuhinya kebutuhan strategis masyarakat. Strategi pendekatan ini memerlukan adanya organisasi-organisasi lokal dan kelompok-kelompok sejenis yang dapat menggunakan peningkatan kesadaran mobilisasi politik dan pendidikan non-formal.

Dasar untuk Perubahan-Perubahan Struktural dan Normatif dalam Pembangunan yang Berkelanjutan

- ❖ Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat dalam kegiatan produksi-konsumsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri: dan memecahkan masalah-masalah mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga, dan komunitas;
- ❖ Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi dalam sistem produksi-konsumsi yang sesuai dengan kaidah-kaidah sistem swa-organisasi;
- ❖ Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasikan secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal dengan

memobilisasi sumber-sumber yang ada pada sistem jaringan internasional.

Dengan demikian, pembangunan seperti ini, mensyaratkan transformasi struktur-struktur; sehingga perlu ada perubahan hukum dan aturan kemasyarakatan, sistem hak milik dan kontrol atas masyarakat, aturan perburuhan, institusi sosial, dan legal yang melindungi kontrol sosial masyarakat. Dalam cara mencapai kebutuhan-kebutuhan itulah, pendekatan pembangunan ini memerlukan strategi penguatan diri (*empowerment*) secara mendasar sangat berbeda dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Pendekatan ini berupaya untuk mencapai kebutuhan strategis masyarakat secara tidak langsung melalui kebutuhan praktis masyarakat, dengan menghindari konfrontasi secara langsung dengan membangun kebutuhan praktis masyarakat sebagai basis untuk membangun landasan yang kuat, sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan strategis.

III.2 Pengembangan Jaringan Intemasional

Paradigma dan pendekatan pembangunan lainnya yang perlu diperhatikan adalah upaya mengembangkan sistem jaringan intemasional. Dalam pendekatan ini, jaringan intemasional dianggap sebagai sumber kekuatan dan pendukung walaupun di sisi lain dapat menjadi sumber kehancuran yang potensial untuk mengembangkan pola-pola produksi dan konsumsi yang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan negara (pemerintah), baik di tingkat lokal maupun nasional. Cara yang dapat dilakukan, antara lain melalui strategi kerja sama intemasional dan penguatan pada sistem sumber daya lokal dan nasional untuk menggerakkan dan memobilisasi sistem sumber yang ada di peringkat antarbangsa. Bentuk kerja sama ini, yang utama adalah kerja sama antarorganisasi/institusi lokal serta kekuatan ataupun pengaruh personal yang ada dengan sistem jaringan organisasi yang ada pada tingkat intemasional. Upaya ini perlu untuk menggerakkan dan atau memobilisasi berbagai sumber yang dipastikan sebagai kekuatan yang ada dan penting untuk transformasi struktur ataupun pola-pola perubahan dalam kehidupan masyarakat.

III.3 Peningkatan Produktivitas dan Pelayan Sosial

Pembangunan perlu peningkatan produktivitas (*productivity enchancement*). Dimensi ini dapat merupakan area pertemuan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial politik, dalam hal ini pembangunan ekonomi yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia (*human resources development*). Untuk itu dibutuhkan pembangunan: 1) *infra-struktur*; 2) *infra-struktur finansial*; 3) *infra-struktur sosial dan pengembangan sumber daya manusia*; dan 4) *sistem perlindungan produksi dan konsumsi*. Selain itu, diperlukan juga pelayanan sosial (*social services*) yang mencakup *ruang lingkup pembangunan kesejahteraan rakyat* yang merupakan subsistem dan pembangunan nasional. Kamerman & Kahn (1979) menjelaskan enam komponen atau subsistem dalam arti luas, antara lain: 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*), 4) pelayanan kerja, perumahan dan 6) pelayanan sosial personal (*personal social services*).

Artinya, produktivitas dilaksanakan bersama pelayanan sosial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masyarakat.

III.4 Pengembangan Masyarakat

Dalam konteks sosial politik, pendekatan pengembangan masyarakat (*community development*), hakekatnya juga diperlukan sebagai pembangunan dari bawah (*bottom-up*). Namun ditinjau dari sisi pemerintah (*government*), selama ini, pengembangan masyarakat merupakan hasil dari perencanaannya dari atas (*top-down*), sehingga masyarakat akhirnya sebagai pelaksana. Berbeda dengan pengembangan masyarakat yang biasa dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO's), yang dapat melepaskan diri dari keterikatan kepada struktur organisasi pemerintah secara vertikal maupun wilayah administrasi, sehingga NGO's lebih dapat mengembangkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. Namun, idealnya, pengembangan masyarakat antara GO dan NGO's pada akhirnya harus saling *komplementer*, karena pemerintah juga mengalami keterbatasan sumber-sumber daya yang tersedia untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pendekatan pengembangan masyarakat ini harus memperhatikan kelompok-kelompok dan individu-individu yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Namun pada akhirnya diperlukan *pendekatan terpadu*, yang bertolak pada *pendekatan masyarakat dengan* menerapkan juga *pendekatan individu* dan *pendekatan kelompok*. Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya mempunyai persamaan tujuan, yaitu untuk mempengaruhi individu, kelompok dan masyarakat,

termasuk perubahan sosial dan dampaknya. Bagaimanapun, sasarannya adalah tetap terfokus pada individu, kelompok maupun masyarakat yang merupakan "*klien yang perlu dirubah*" nilainya maupun perilakunya. Dalam konteks institusi, pemerintah dapat menggerakkan, memobilisasi dan bahkan mengarahkan pola-pola perubahan produksi dan konsumsi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berorientasikan pada kesejahteraan. Pendekatan pemerintah ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan strategis masyarakat secara tidak langsung melalui berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, dengan menghindari konfrontasi secara langsung dengan membangun untuk mencapai kebutuhan strategis

Pendekatan Individu	Pendekatan Kelompok	Pendekatan Masyarakat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokusnya adalah individu dan keluarga 2. Relasi yang diterapkan adalah relasi antar pribadi 3. Cara-cara pendekatan yg diterapkan Lebih intensif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok dan proses kelompok merupakan inti pendekatan 2. Unsur kepemimpinan kelompok juga merupakan hal yang penting 3. Dalam pendekatan kelompok pada dasarnya sangat tergantung pada keterlibatan kerjasama antar anggota kelompok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titik tolaknya utk mengatasi masalah dalam masyarakat, oleh karenanya mencakup lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. 2. Dalam pendekatan masyarakat diterapkan relasi pribadi, kelompok, dengan antar kelompok 3. Cara-cara pendekatan yang diterapkan kurang intensif.

Dengan demikian, pendekatan pengembangan masyarakat ini dapat juga dipandang sebagai satu model yang berusaha dan terbuka untuk menggabungkan pendekatan-pendekatan lain, sebagai strategi untuk mem-perbaiki keadaan hidup orang. Bagaimanapun, model pendekatan ini tidak iapat dilaksanakan tanpa menggabungkan berbagai pendekatan dan atau menerima sumbangan dari disiplin dan teori-teori yang lain secara kreatif dan dinamik. Oleh karena itu, pendekatan ini secara konsepsional tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan sumbangan berbagai teori yang dijadikan landasan praktek. Artinya, sebagai satu pendekatan menunjuk-kan semakin luas dan kompleksnya ruang lingkup bidang kegiatan ini dalam pembangunan. Dalam pendekatan ini perlu berusaha terus menggabungkan berbagai *pendekatan (sintesis bam)*.

IV. KESIMPULAN: KEBIJAKAN STRATEGI INTERVENSI

1. Penciptaan lingkungan ekonomi, politik dan hukum yang merangsang pembangunan sosial di segala tingkatan; dengan fokus pada pengentasan kemiskinan sebagai keharusan moral, politik dan ekonomi serta mendorong pembangunan ke arah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
2. Penyusunan program penyesuaian struktural untuk mencapai tujuan pembangunan yang mencakup pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang produktif dan mendorong integrasi sosial; sehingga memungkinkan semua orang meraih sumber kehidupan yang terjamin dan berkelanjutan melalui pilihan lapangan kerja secara bebas;
3. Mengembangkan integrasi sosial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan mendorong peran serta semua rakyat membangun masyarakat yang stabil, aman dan berkeadilan; agar dapat mencapai pemerataan, dengan menggunakan lebih efisien dana keuangan yang diperuntukkan bagi pembangunan sosial agar tercapai tujuan pembangunan nasional.
4. Memperkuat kerangka kerja sama internasional untuk pembangunan sistem produksi-konsumsi dalam semangat kemitraan.

Dalam upaya mengembangkan strategi dalam memberdayakan masyarakat, perlu juga ditekankan pentingnya "*social and political engineering*". Kondisi ini dapat dipahami dengan mengacu pada persepsi manusia terhadap masalah strategi, dan langkah-langkah dalam menghadapi perubahan dapat dilakukan dengan:

1. *Strategi berdasarkan media*, yaitu para komunikator yang menggunakan strategi ini biasanya mengelompokkan kegiatan mereka sekitar medium.
2. *Strategi partisipasi*, yaitu prinsip-prinsip penting dalam mengorganisasi kegiatan kerja sama komunitas dan pertumbuhan pribadi (*community participation growth*). Strategi ini yang penting, pelaksanaannya tercermin dalam bentuk-bentuk kegiatan pembinaan. non-formal; yang terdiri atas *strategi persuasif*, *strategi power*, dan *strategi reduktif* atau *instruksional*. Sumber daya terdiri atas sumber daya manusia, modal, teknologi, dan seni

budaya, semua ini untuk melakukan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

3. *Strategi pemasaran*. Strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi dengan prinsip "*social marketing*" yang menjadi pegangan. Cara yang biasa digunakan dalam pembinaan dan kemampuan yang akan dicapai mulai dari ceramah sampai dengan tutorial sehingga yang dibina kemampuan: menjelaskan konsep, prinsip atau prosedur sampai dengan mampu mengimplementasikan. Dengan demikian, strategi untuk meningkatkan peran masyarakat, antara lain dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi dan lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat lokal.

Dalam praktek, peningkatan peran masyarakat dapat dilakukan melalui bekerja sama dengan *stake-holders* dalam semua kegiatan proses produksi dan konsumsi. Dalam usaha melibatkan masyarakat, strategi dan teknik yang dapat dilakukan adalah:

Strategi	Teknik
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemecahan <i>masalah</i>, mengajak masyarakat menyadari masalah yang dihadapi, mendiskusikan bagaimana cara mengatasi masalah bersama. 2. <i>Mendirikan lembaga baru</i>, dengan menggunakan sumber daya masyarakat setempat. 3. <i>Konfrontasi</i>, dengan mengkonfrontasikan masyarakat dengan permasalahan yang dihadapi, yg dapat menimbulkan kesadaran dan kekuatan dalam masyarakat untuk mengatasi dan mencegah masalah. 4. <i>Tempi pendidikan</i>, untuk mendidik individu yang mengikuti program, biasanya dalam bentuk latihan bagi warga masyarakat untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah. 5. <i>Perubahan tingkah laku</i>, untuk mempengaruhi perubahan dalam suatu sistem atau sub-sistem dengan merubah tingkah laku, baik anggotanya atau wakil-wakil dan suatu sistem. 6. <i>Strategi melengkapi anggota baru</i>, yaitu strategi yang dipergunakan karena lembaga dimana petugas bekerja kekurangan tenaga, dengan mengajak warga masyarakat yang bersedia secara sukarela menaisi kekurangan tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latihan, melatih warga masyarakat setempat untuk mengerti dan menguasai pengetahuan atau ketrampilan tertentu. 2. <i>Membina</i> relasi, dengan warga setempat. 3. <i>Pengambilan keputusan</i>, oleh warga setempat. 4. <i>Peninjauan</i> ke tempat lain – untuk melihat praktek atau pelaksanaan peran masyarakat. 5. <i>Pencacatan</i>; kegiatan, perkembangan dan proses pelaksanaan kegiatan periu untuk mendapatkan gambaran, memantau dan mengevaluasi kegiatan. 6. <i>Visualisasi (percontohan)</i>, untuk memberikan gambaran yang nyata tentang apa yang dimaksud, agar dengan mudah dapat dimengerti oleh warga masyarakat. 7. <i>Pemberian pendapat</i>, bila dikehendaki oleh warga masyarakat atau dalam hal mereka tidak mengetahui apa yang sebaiknya dikerjakan. 8. Belajar dari <i>pengalaman</i>. Pengalaman adalah guru yang baik untuk menghindari kesalahan-kesalahan di masa yang akan datang.

Strategi dan teknik di atas, bukan hanya ditujukan untuk menyelesaikan-nisalah, tetapi juga bagaimana mengembangkan program. Dalam semua kegiatan ini, perlu disadari bahwa peran dan partisipasi masyarakat tidak selalu timbul dengan sendirinya, oleh karena itu, diperlukan antara bimbingan motivasi agar warga masyarakat terlibat secara emosional kegiatan-kegiatan pembangunan. Untuk itu diperlukan kerja sama kelompok-kelompok dalam masyarakat, instansi pemerintah dan swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Boer.L. & Koekkoek A. 1994. "Development and Human Security", dalam *Third world Quartely Quartely Journal of Emerging Areas*, Vol. 15 No. 3 September 1994.
- Brager,. G & Specht, H. 1969. *Community Organizing*. New York: Columbia University Press.
- Bryant & White. 1982. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Dove. M.R (Eds). 1988. *The Real and Imagined Role of Culture in Development, Case rom Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Dunham, Arthur. 1962. *Community Welfare Organization, Principles and Practice*. New York: Thomas Y. Croweel Company.
- Everitt A. & Hardiker P. 1996. *Evaluating For Good Practice*. London: MacMillan Press.
- Kramer R. M & Specht, H. 1969. *Reading in Community Organization Practice*. London: Prentice Hall.
- Kartasasmita G. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Bandung: ITB.
- Khan, A.J. 1973. *Social Policy and Social Services*. New York: The Free Press.
- Macaruv, D. 1995. *Social Welfare: Structure and Practice*. London: Sage Pub.
- Mahbub Ul Haq. 1985. *Human Development Report 1985*. New York: Oxford University Press.
- Midgley, J. 1995. *Social Development, The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication.
- Moore, W. & Cook, R. (Eds). *Reading on Social Change*. New Jersey: Englewood Cliffs, NI, Prentice-Hall Inc.
- Posavac, Emil J. and Raymond G. Carey. 1985. *Program Evaluation: Methods anda Case Studies*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.